

1 PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tumbuhnya institusi atau lembaga keuangan dengan berbagai skala dan beragam layanannya disinyalir belum secara merata dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Lembaga keuangan formal merupakan lembaga kepercayaan (*trust institution*) yang memiliki peraturan atau regulasi yang sangat ketat dalam mengelola usahanya. Akibatnya hanya sekelompok masyarakat tertentu atau unit usaha yang dianggap *feasible* dan *bankable* yang dapat memanfaatkan layanan yang disediakan oleh lembaga keuangan. Sementara itu kelompok masyarakat atau unit usaha yang sebenarnya membutuhkan dukungan finansial serta bimbingan manajerial jauh dari jangkauan atau belum tersentuh oleh layanan lembaga keuangan yang disebabkan oleh persyaratan yang tidak terpenuhi. Akhirnya kelompok masyarakat ini harus berjuang sendirian untuk memenuhi berbagai kebutuhan layanan keuangan. Istilah populer yang saat ini digunakan untuk menamai kelompok masyarakat yang belum atau tidak terlayani sistem keuangan tersebut adalah kelompok keuangan eksklusif (*financial exclusion*) sebagai lawan kata dari keuangan inklusif (*financial inclusion*).

Istilah *financial inclusion* atau keuangan inklusif menjadi tren setelah krisis 2008 terutama didasari dampak krisis kepada kelompok *in the bottom of the pyramid* (pendapatan rendah dan tidak teratur, tinggal di daerah terpencil, orang cacat, masyarakat yang tidak mempunyai dokumen identitas legal, dan masyarakat pinggiran) yang umumnya *unbanked* dan jumlahnya relatif tinggi di luar negara maju. Hingga saat ini belum atau tidak ada definisi baku mengenai keuangan inklusif, sehingga masing-masing lembaga mencoba menterjemahkan istilah tersebut sesuai dengan kondisi yang ada serta tujuan yang hendak dicapai. Hal ini dapat disimak dari beberapa contoh definisi berikut:

Consultative Grup to Assist the Poor - Global Partnership For Financial Inclusion (CGAP-GPFI): “*state in which all working age adults have effective access to credit, savings, payments, and insurance from formal service providers. Effective access involves convenient and responsible service delivery, at a cost affordable to the customer and sustainable for the provider, with the result that financially excluded customers use formal financial services rather than existing informal options*”

Financial Action Task Force (FATF): “*financial inclusion involves providing access to an adequate range of safe, convenient and affordable financial services to disadvantaged and other vulnerable groups, including low income, rural and undocumented persons, who have been underserved or excluded from the formal financial sector*”.

(RBI/Reserve Bank of India): “*process of ensuring access to appropriate financial products and services needed by all sections of the society in general and vulnerable groups such as weaker sections and low income groups in particular, at an affordable cost in a fair and transparent manner by regulated, mainstream institutional players*”.

Meski beberapa definisi keuangan inklusif diatas berdeba-beda, namun ada kesamaan tujuan yang hendak dicapai dari definisi tersebut yaitu: upaya untuk memberikan akses keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat *unbanked*, mudah diakses, murah, dan aman. Kelompok *unbanked* adalah masyarakat atau sekompok individu yang sama sekali belum terakses pada lembaga keuangan. Tujuan akhir dari keuangan inklusif ini dalam jangka panjang adalah meningkatkan kapabilitas masyarakat untuk dapat hidup lebih sejahtera, keluar dari garis kemiskinan.

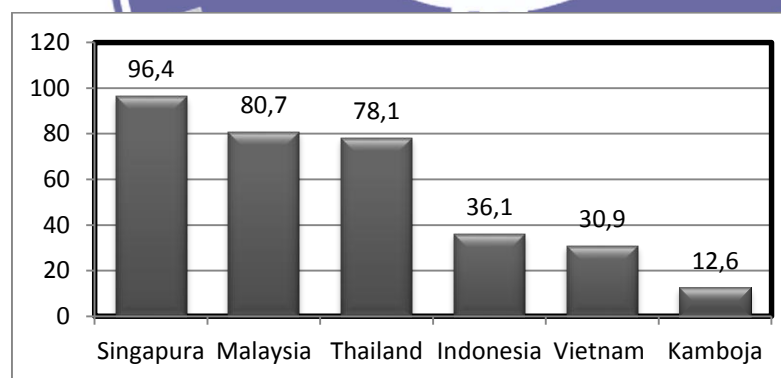
Keuangan inklusif dalam beberapa periode terakhir menjadi bahasan yang penting diberbagai negara. Hal ini didasarkan atas beberapa fakta terkini yang dirilis oleh *World bank* (2015), yaitu dua miliar orang - atau 38 persen dari orang dewasa di dunia – belum tersentuh atau tidak menggunakan jasa keuangan formal, bahkan 73 persen orang miskin tak memiliki rekening bank karena biaya, jarak perjalanan ke lembaga keuangan terdekat, serta persyaratan seringmemberatkan dalam membuka rekening keuangan. Lebih dari setengah kelompok ini merupakan orang dewasa, dimana mereka 40 persen berasal dari keluarga miskin yang bermukim di negara-negara berkembang.

Selama beberapa dekade terakhir, telah banyak upaya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penyedia jasa keuangan guna meningkatkan keuangan inklusif masyarakat, yaitu dengan cara menawarkan layanan finansial berbasis teknologi telekomunikasi yang dapat diakses melalui telepon seluler. Lembaga-lembaga tersebut meliputi organisasi non-pemerintah, koperasi, lembaga pembangunan berbasis masyarakat, bank-bank komersial dan pemerintah, perusahaan asuransi dan penyedia jasa kartu kredit, telekomunikasi, kantor pos, dan bisnis lain. Lembaga-lembaga ini menyediakan berbagai titik layanan atau *point-of-sale* sebagai model bisnis baru. Namun demikian layanan ini baru dapat dimanfaatkan jika seseorang memiliki rekening transaksi atau deposit, lebih lanjut adanya rekening atau deposit ini dapat menjadi pintu gerbang bagi seseorang untuk dapat terinklusi keuangan secara penuh.

Penelitian yang dilakukan oleh *World bank* pada tahun 2015 (Gambar 1) terkait dengan keuangan inklusif di Indonesia menunjukkan bahwa, Indeks Keuangan Inklusif (IKI) masyarakat Indonesia yang berumur di atas 15 tahun mencapai 36,1. Artinya baru sekitar 36,1 persen masyarakat Indonesia yang memanfaatkan produk tabungan pada lembaga keuangan formal dalam hal ini adalah bank. Seperti diketahui bahwa lembaga keuangan formal tidak hanya bank, namun juga termasuk pegadaian, asuransi, pembiayaan (*leasing*), dana pensiun, dan pasar saham. Perhitungan IKI yang didasarkan hanya pada kepemilikan tabungan pada lembaga keuangan bank, diduga karena tabungan merupakan jenis produk dasar dan umumnya menjadi persyaratan langsung ataupun tak langsung dalam penggunaan produk dan layanan lembaga keuangan lainnya.

Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, bahkan pernah mendapat apresiasi yang besar dari dunia internasional menduduki peringkat 3 sebagai negara yang tahan krisis moneter 2008 dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1 persen. Ironisnya pertumbuhan ekonomi tinggi tersebut tidak berdampak baik ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat kecil. Menurut Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN(2014:1) pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan yang menciptakan pengentasan kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, dan pemerataan

pendapatan. Namun pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi ini justru diikuti dengan meningkatnya kondisi pengangguran dan kemiskinan (Macroeconomic Dashboard, 2014). Indeks koefisien gini Indonesia juga justru memburuk dari tahun ketahun, bahkan hingga akhir 2013 mencapai 4,1 persen (Bank Dunia, 2014). Kondisi ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dalam hal ekonomi masih rendah. Salah satu penyebabnya adalah tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia yang sangat rendah. Padahal menurut Ketua Dewan Komisiner OJK Muliawan Hadad dalam Wibowo (2014) literasi keuangan yang baik berarti menciptakan masyarakat yang memiliki kemampuan keuangan, sehingga dapat melengkapi individu dengan keterampilan praktis yang memungkinkan mereka untuk mengelola dana, meminimalkan risiko, dan meningkatkan kesejahteraan. Jika dibandingkan dengan tingkat keuangan inklusif dengan negara-negara ASEAN, posisi Indonesia masih jauh di bawah Singapura, Malaysia dan Thailand (Gambar 1), meski masih lebih baik jika dibandingkan dengan Vietnam dan Kamboja. Penelitian yang dilakukan oleh *World bank* meski dirilis pada pertengahan tahun 2015, namun survey lapanganya dilakukan di penghujung tahun 2014. Pada pertengahan tahun 2015, Bank Indonesia melakukan survey serupa untuk mendapatkan informasi lebih rinci. Hasil IKI yang diperoleh dari survey tersebut berada pada nilai 39,8. Menarik untuk dianalisa bahwa, peningkatan nilai IKI dalam kurun waktu kurang lebih 6 bulan dapat meningkat hingga mencapai 3,7 persen, namun bila merujuk pada kaidah survey, perbedaan nilai tersebut dapat disebabkan oleh keragaman sampel (Cochran, 1989). Artinya peningkatan nilai IKI tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh kinerja lembaga keuangan atau pemerintah melalui berbagai program peningkatan keuangan inklusif, namun dapat juga disebabkan oleh *sampling error*.

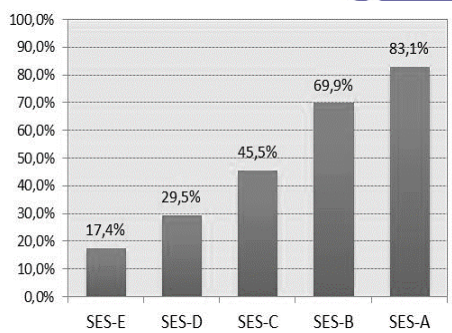


Gambar 1 Indeks keuangan inklusif beberapa negara ASEAN

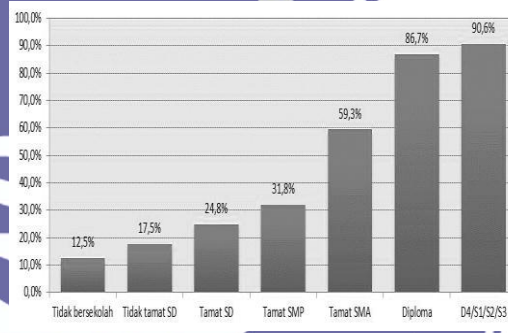
Menurut Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Kusumaningtuti Soetiono dalam Dewi (2014) tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih rendah dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand. Di Malaysia, tingkat literasi keuangan masyarakatnya mencapai 66 persen, Singapura mencapai 98 persen, sedangkan Thailand mencapai angka 73 persen, sementara Indonesia masih pada angka 28 persen. Salah satu faktor penyebab rendahnya literasi keuangan tersebut adalah kondisi geografis Indonesia yang pada umumnya sekitar 60 persen berada pada daerah pedesaan (Dewi, 2014). Data hasil survei Bank Dunia yang dikutip Agus (2014) menunjukkan bahwa daerah yang terletak di daerah pedesaan cenderung lebih sulit mengakses jasa

keuangan dilembaga keuangan formal seperti bank, berbeda dengan wilayah perkotaan yang cenderung lebih mudah dalam mengakses. Berdasarkan kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa mengakses layanan jasa keuangan pada daerah terpencil memang tidak mudah, sehingga banyak dari masyarakatnya masuk dalam kategori *unbanked people*. Masyarakat dalam kategori tersebut adalah masyarakat yang memiliki *financial literacy* yang rendah, sehingga perilaku keuangan personalnya juga tidak baik. Dampak dari hal tersebut mengakibatkan masyarakat tidak mengenal produk perbankan. Di dalam pembangunan ekonomi Indonesia, perbankan memiliki peran yang besar untuk menjadi motor penggerak kegiatan inklusi keuangan, mengingat perbankan Indonesia memiliki share kegiatan keuangan sampai dengan 80 persen (Bank Indonesia, 2014:6)

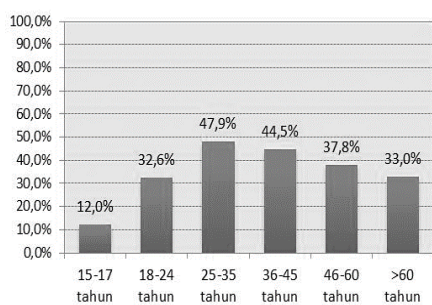
Menarik untuk dianalisa bahwa, penelitian yang dilakukan oleh BI yang melibatkan 2612 responden yang tersebar di 10 propinsi di Indonesia, mengungkapkan bahwa, terjadi perbedaan IKI yang signifikan dari sisi demografi seperti disajikan pada Gambar 2 hingga Gambar 5



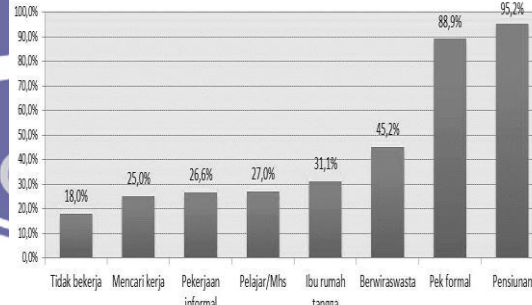
Gambar2 IKI menurut SES



Gambar 3 IKI menurut tingkat pendidikan



Gambar 4 IKI menurut usia

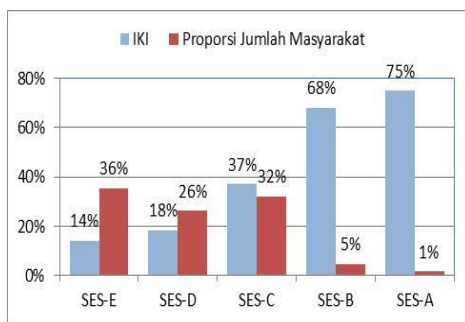


Gambar 5 IKI menurut pekerjaan

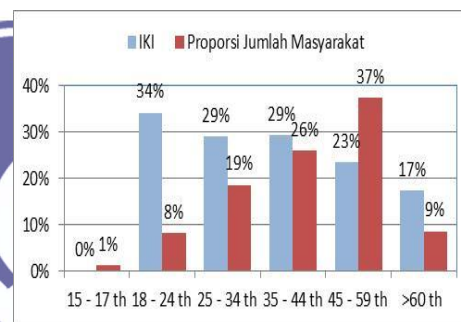
Aspek demografi yang meliputi tingkat pengeluaran Individu (Sosial Ekonomi Status, SES), usia, pendidikan, serta pekerjaan (Bank Indonesia, 2015) menunjukkan bahwa, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang peluang mendapatkan pekerjaan formal semakin tinggi, dan tingkat pendapatannya yang diproksi melalui pengeluaran individu juga semakin tinggi. Kelompok masyarakat ini memiliki IKI yang tinggi. Sebaliknya masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah dan bekerja pada sektor informal memiliki tingkat pengeluaran individu relatif rendah, dampaknya adalah nilai IKI-nyapun relatif rendah.

© Hak Cipta Milik IPB
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencatunkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB.
 Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.

Masyarakat dengan pekerjaan informal diantaranya adalah petani dengan lahan tidak lebih dari 0,5 ha, merupakan bagian dari masyarakat dengan SES D (26 persen) dan E (36 persen) atau tingkat pengeluarannya per bulan tidak lebih dari Rp 1,25 juta (Gambar 7). Kelompok masyarakat ini nilai IKI-nya terendah masing-masing 18 persen (SES-D) dan 14 persen (SES-E). Fakta menarik lain adalah masyarakat dengan usia di atas 45 tahun nilai IKI-nya tidak lebih dari 23 persen (Gambar 7). Menyimak hasil penelitian ini dapatlah disimpulkan bahwa, rendahnya tingkat keuangan inklusif Indonesia disebabkan oleh rendahnya tingkat keuangan inklusif dari 62 persen masyarakat Indonesia, dimana mayoritas bekerja pada sektor informal (diantaranya adalah petani), dengan tingkat pengeluaran tidak lebih dari Rp.1250000,- per bulan.



Gambar 6 IKI menurut pekerjaan



Gambar 7 IKI menurut pekerjaan informal dan usia

Perlu disampaikan bahwa, berdasarkan kaidah yang digunakan oleh Bank Dunia (*World bank*, 2012), Keuangan Inklusif meliputi 3 aspek yaitu; akses (*access*) lembaga keuangan formal, tingkat penggunaan (*usage*), dan kualitas penggunaan (*quality*). Akses (*access*) merupakan aspek yang menjelaskan ketersediaan berbagai lembaga keuangan formal pada suatu wilayah. Aspek kualitas (*quality*) merupakan kelengkapan suatu produk atau layanan keuangan guna memenuhi kebutuhan penggunanya. Sementara aspek penggunaan (*usage*) merupakan kemampuan masyarakat dalam menggunakan berbagai produk dan atau layanan yang disediakan oleh lembaga keuangan formal guna mengoptimalkan manfaatnya. Meski keuangan inklusif meliputi 3 aspek, namun dalam perhitungan indeks Keuangan Inklusif yang dilakukan pada Survey Keuangan Inklusif Global tahun 2015 (*The Global Financial Inclusion Around the World 2015*), hanya berbasis pada aspek akses khususnya kepemilikan tabungan pada lembaga keuangan formal (*World bank* 2015).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan BI (2015), rendahnya tingkat keuangan inklusif petani disebabkan masih relatif rendahnya ketersediaan lembaga keuangan (LK) formal di wilayah mereka tinggal, tingkat penetrasi bank (Bank Umum maupun BPR) dan koperasi masing-masing baru mencapai 40 persen dan 42 persen, artinya tidak semua wilayah terutama di pedesaan terdapat Lembaga Keuangan (LK) formal (Bank dan non Bank). Disamping itu sebaran keberadaan kedua lembaga keuangan formal ini antar wilayah belum merata. Terkait dengan penggunaan produk tabungan dari LK formal oleh kelompok masyarakat bawah, tercatat baru 21,2 persen. Rendahnya kelompok masyarakat kelas bawah yang

menabung pada LK formal menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat keuangan inklusif di Indonesia.

Rendahnya tingkat keuangan inklusif masyarakat kelas ekonomi bawah, pada dasarnya telah disadari oleh pemerintah. Oleh karenanya upaya untuk menaikkan tingkat keuangan inklusif ini telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu, salah satunya adalah dengan meluncurkan produk TabunganKu, yaitu produk tabungan dengan persyaratan yang mudah dan biaya rendah. Selain itu juga diciptakan Layanan Keuangan Digital (LKD) yang diprakarsai oleh Bank Indonesia serta peluncuran LAKU PANDAI (Layanan Keuangan tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusi) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Baik LKD maupun LAKU-PANDAI merupakan layanan keuangan berbasis telepon seluler dan *Web*, dimana masyarakat dapat menggunakannya untuk transaksi tanpa uang tunai namun menggunakan uang digital. Untuk dapat melakukan hal ini, masyarakat harus mendaftarkan diri pada agen keuangan terdekat untuk mendapatkan FIN (*Finance Identity Number*), yang akan disimpan dalam perangkat *handphone*-nya guna otorisasi transaksi kelak. Untuk dapat melakukan transaksi seseorang harus memiliki deposit, dimana deposit tersebut dapat ditukarkan dalam bentuk uang tunai pada agen. Selain itu deposit tersebut akan diperhitungkan sebagai tabungan, sehingga akan mendapatkan bunga layaknya simpanan. Meski layanan keuangan digital tersebut memiliki banyak manfaat, namun dalam perkembangannya keduanya belum tumbuh seperti yang diharapkan.

Perumusan Masalah

Rendahnya tingkat keuangan inklusif Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN lainnya, salah satunya dikontribusi oleh ketiadaan kepemilikan tabungan kelompok masyarakat berpendapatan rendah (*the bottom of pyramid*) pada lembaga keuangan bank formal, atau sebagai akibat rendahnya akses pada produk dan layanan lembaga keuangan formal seperti bank, asuransi, dana pensiun, pegadaian, dan pasar saham. Kelompok masyarakat ini jumlahnya berkisar 62 persen dari masyarakat Indonesia, diantaranya adalah petani dengan luasan lahan sempit. Honohan (2004) mengklasifikasikan hambatan-hambatan yang dihadapi masyarakat dalam mengakses layanan keuangan menjadi 3 kelompok utama, yaitu: hambatan harga (*price barriers*), hambatan informasi (*information barrier*); dan hambatan desain produk dan jasa (*product and service design barriers*). Dalam konteks Indonesia terdapat hambatan lain dalam mengakses jasa keuangan, yaitu kurangnya sarana distribusi (*channel*) yang lebih sesuai dengan kondisi negara kepulauan.

Disamping 3 faktor yang diduga menjadi penghambat akses masyarakat kelas bawah pada lembaga keuangan formal, ada paradigma lain yang juga turut mempengaruhi perilaku masyarakat dalam menabung, yaitu menabung merupakan upaya menyimpan kelebihan dana dari selisih pendapatan setelah dikurangi biaya untuk berbagai kebutuhan hidup. Oleh karenanya jika tidak ada sisa uang, maka peluang untuk menabung menjadi rendah atau hilang sama sekali. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait guna menghilangkan hambatan-hambatan diatas telah dilakukan, seperti menciptakan produk atau layanan keuangan seperti Tabunganku yang berbiaya

murah dan persyaratan yang mudah, serta menyediakan Layanan Keuangan Digital (LKD, BI), serta LAKU-PANDAI (OJK) yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai transaksi keuangan tanpa harus membuka rekening tabungan pada lembaga keuangan bank, dan sekaligus mendorong secara tidak langsung agar masyarakat untuk terbiasa menabung sekaligus dapat mengelola keuangan dengan baik. Dengan demikian hal ini akan dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun sayangnya upaya tersebut masih belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan.

Fakta di atas menunjukkan bahwa upaya meningkatkan keuangan inklusif pada kelompok masyarakat ekonomi bawah termasuk didalamnya adalah petani dengan lahan sempit, akan sulit membuahkan hasil, karena apa yang dilakukan hanya mendorong sisi *supply*, sementara dari sisi *demand*, yang meliputi perilaku dalam pengelolaan keuangan, persepsi dan preferensi terhadap produk dan layanan keuangan serta aspek psikografi yang terkait dengan motivasi dan minat keuangan formal merupakan aktivitas kompleks yang melibatkan dua aspek yakni, aspek *supply* dan *demand*. Oleh karenanya upaya peningkatan keuangan inklusif masyarakat tidak cukup hanya didekati dari sisi *supply* melalui penyediaan dan kemudahan akses berbagai produk dan layanan lembaga keuangan sesuai kebutuhan masyarakat, namun hambatan-hambatan dari sisi *demand* pada kelompok masyarakat tertentu perlu dianalisa secara mendalam, untuk mendapatkan informasi relevan guna meningkatkan adopsi atau penerimaan kelompok masyarakat tersebut terhadap inovasi layanan keuangan yang ditawarkan, dan sekaligus mendapatkan masukan guna memperbaiki kebijakan atau strategi yang diterapkan saat ini.

Berdasarkan permasalahan di atas upaya untuk meningkatkan keuangan inklusif yang meliputi peningkatan akses, peningkatan penggunaan serta kualitas dalam pemanfaatan produk dan layanan lembaga keuangan pada kelompok petani memiliki arti strategis. Hal ini tidak saja akan memberdayakan petani agar mandiri dalam pengelolaan keuangannya yang terbatas bahkan cenderung kurang, namun juga akan membantu mengefisiensikan aktivitas transaksinya yang terkait dalam pengelolaan usahatani. Peningkatan pengetahuan terhadap berbagai produk dan layanan lembaga keuangan dengan berbagai keuntungan dan risikonya akan mendorong petani dapat meningkatkan kualitas penggunaan produk dan layanan LK.

Untuk meningkatkan keuangan inklusif kelompok tani, disadari bukan suatu hal yang mudah, mengingat permasalahan utama yang dihadapi kelompok ini adalah tidak adanya kelebihan dana yang dimiliki dari hasil usahanya. Oleh karenanya upaya “memaksa” mereka untuk mengelola dana yang terbatas melalui pemanfaatan produk dan layanan keuangan menjadi suatu hal yang perlu dilakukan. Untuk itu pemahaman yang mendalam mengenai perilaku petani dalam pengelolaan keuangannya, serta minatnya untuk terinklusi pada lembaga keuangan formal perlu dirumuskan. Selain itu berbagai hambatan yang mungkin muncul perlu dielaborasi secara optimal agar dapat dirumuskan strategi yang komprehensif guna meningkatkan minat petani untuk menggunakan produk atau jasa lembaga keuangan formal, sebagai pijakan dalam meningkatkan keuangan inklusif.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk menjawab tujuan seperti berikut:

1. Mengukur tingkat keuangan inklusif petani .
2. Mengidentifikasi tingkat pengetahuan petani terkait keuangan inklusif yang meliputi akses, tingkat penggunaan dan serta kualitas penggunaannya.
3. Mempelajari kebutuhan, permasalahan dan harapan serta faktor-faktor yang mempengaruhi minat petani terhadap produk dan jasa keuangan khususnya layanan keuangan digital.
4. Menguji pengaruh faktor yang berperan dalam peningkatan minat petani menggunakan produk atau layanan lembaga keuangan.

Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan didapatkan manfaat, dalam hal:

Manfaat Akademik

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam ilmu pengetahuan dan memberi manfaat bagi para akademisi, khususnya yang terkait dengan ilmu pengetahuan bidang manajemen strategi. Terutama yang terkait dengan lingkungan eksternal, strategi bisnis, kapabilitas organisasi, dan kinerja perusahaan.
- b) Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi terhadap penelitian manajemen strategi dan menjadi pendukung penelitian-penelitian terdahulu, sehingga dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian yang terkait di kemudian hari khususnya yang berkaitan dengan temuan teori-teori yang berhasil diungkap dalam penelitian ini.

Manfaat Praktis (manfaat manajemen)

- a) Dapat dipakai sebagai referensi tentang penelaahan dan penerapan strategi perusahaan di industri keuangan . Menjadi literatur bagi kegiatan akademik atau penelitian yang dapat dilakukan penelitian lanjutan.
- b) Dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan perusahaan khususnya dalam menentukan strategi perusahaan dan kapabilitas organisasi, penentuan langkah untuk meningkatkan kinerja perusahaan khususnya di industri keuangan .
- c) Dapat dijadikan sebagai acuan dalam menyusun strategi bisnis perusahaan dan mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal dimasa yang akan datang yang akhirnya dapat meningkatkan kinerja perusahaan

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian keuangan inklusif ini berbasis pada definisi yang dikeluarkan oleh *World bank* tahun 2015 yang juga diadopsi oleh beberapa negara. Pada dasarnya ada 3 aspek yang dicakup dalam keuangan inklusi yaitu; *aces*, *quality* dan *usage*. Guna menggambarkan tingkat keuangan inklusif masyarakat petani yang tergolong pada kelompok masyarakat ekonomi bawah (belum berdaya), maka lingkup penelitian ini akan mencoba melibatkan ketiga aspek tersebut yang dikaitkan dengan perilaku petani dalam pengelolaan keuangannya, kebutuhan,

preferensi serta aspek psikografi dan kemampuan adopsi yang akan digambarkan melalui minatnya menggunakan produk atau jasa keuangan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan formal, khususnya layanan keuangan digital.

Kebaruan Penelitian

Penelitian keuangan inklusif ini difokuskan pada model peningkatan keuangan inklusi petani di Indonesia melalui pendekatan dari sisi *demand* yang terkait dengan minat masyarakat kelas ekomoni bawah (*unbanked*) terhadap produk dan layanan keuangan formal yang dikaitkan dengan aspek lingkungan sosial-ekonomi, pengetahuan dan aktivitas usahatannya. Hasil riset ini diharapkan dapat menjadi cetak biru model strategi peningkatan kesejahteraan petani di Indonesia melalui keuangan inklusif.

2 TINJAUAN PUSTAKA

Dalam deskripsi ini, diuraikan tentang berbagai teori, konsep, pandangan, serta hasil penelitian dari para peneliti dan pakar. Berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini juga diuraikan dan dibahas secara mendalam, sehingga dapat diketahui posisi penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Pada bagian akhir, dilakukan sintesa dari berbagai teori dan penelitian terdahulu sehingga memperjelas konsep-konsep dan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil sintesa tersebut, disusunlah kerangka pemikiran konseptual dari penelitian ini.

Model Difusi Inovasi

Menurut Rogers (1995), difusi adalah sebuah proses dimana inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam suatu waktu diantara anggota suatu sistem sosial. Hal ini merupakan tipe khusus dari komunikasi dimana pesan berkaitan dengan ide baru. Hall (2003) menerangkan bahwa difusi merupakan suatu bagian yang intrisik dari proses inovasi.

Cooper (1998) mendefinisikan inovasi sebagai suatu ide, praktek, proses, atau produk baru (penggunaan) yang dianggap sebagai inovasi. Lestari (2012) menyimpulkan bahwa, inovasi adalah suatu ide, praktik atau objek yang dianggap baru oleh seorang individu atau unit adopsi lainnya. Pengertian baru dalam suatu inovasi tidak selalu berhubungan dengan pengetahuan baru. Seorang individu mungkin telah mengetahui suatu inovasi namun belum mengadopsi atau menolaknya. Dengan demikian, kebaruan suatu inovasi tercermin dari pengetahuan, sikap, atau keputusan mengadopsi.

Suatu inovasi mungkin dibutuhkan oleh suatu adopter dalam satu situasi akan tetapi tidak diinginkan untuk adopter potensial lainnya dalam situasi yang berbeda (Oktoriyana, 2014). Menurut Suendro (2010), tingkatan inovasi adalah suatu fenomena yang subyektif, tingkatan yang bervariasi dari keahlian konsumen